

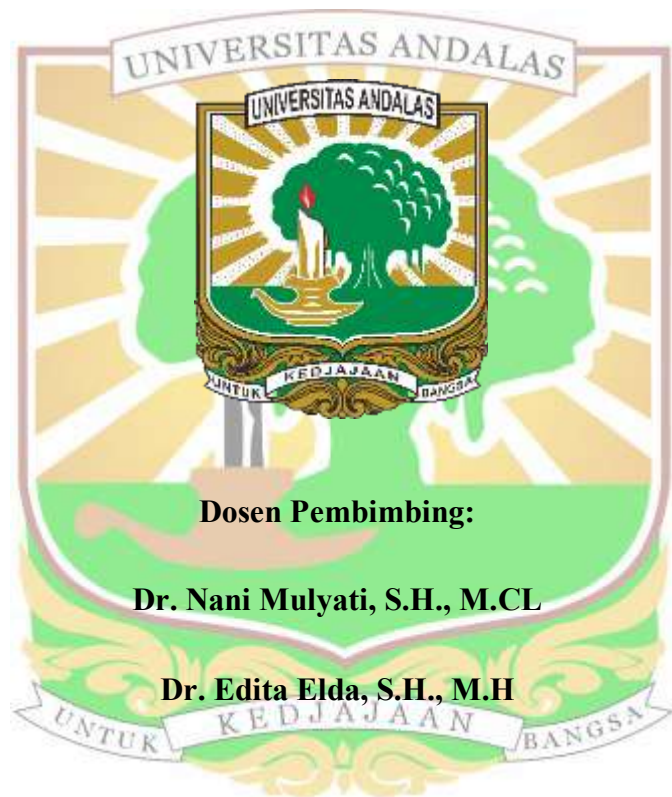
**PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA
LINGKUNGAN HIDUP DI SUMATERA BARAT: STUDI DI
PENGADILAN NEGERI PADANG**

Oleh:

SITI ISTIAZAH

2210112092

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



Dosen Pembimbing:

Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL

Dr. Edita Elda, S.H., M.H

**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

2026

No.Reg: 63/PK-IV/IV/2026

	No. Alumni Universitas	Siti Istiazah	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Padang / 27 Maret 2004 b. Nama Orangtua : Iman Drajat, Rira Delvita, A.Md c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Pidana e. No. BP : 2210112092	f. Tanggal Lulus : 26 Agustus 2026 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 4 Tahun i. IPK : 3,73 j. Alamat : Jln. Murai, Air Tawar Barat, Kota Padang	

PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI SUMATERA BARAT: STUDI DI PENGADILAN NEGERI PADANG

(Siti Istiazah, 2210112092, Fak. Hukum Universitas Andalas, 133 Hlm, 2026)

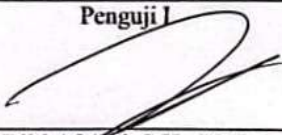
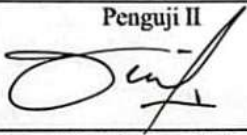
ABSTRAK

Lingkungan hidup merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang wajib dilindungi dari pencemaran dan perusakan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur berbagai larangan dan ancaman pidana, termasuk pidana denda dengan nominal yang relatif besar. Namun dalam praktik peradilan, penjatuhan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup sering kali tidak sebanding dengan ancaman maksimum yang diatur dalam UUPPLH. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan penerapannya dalam putusan pengadilan, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pembuktian dalam pemeriksaan tindak pidana lingkungan hidup di Pengadilan Negeri Padang; dan (2) Apa sajakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda pada tindak pidana lingkungan hidup di Pengadilan Negeri Padang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif-analitis. Data diperoleh dari studi dokumen terhadap putusan tindak pidana lingkungan hidup di Pengadilan Negeri Padang periode 2021-2025 serta wawancara dengan hakim. Dari 28 perkara yang ditemukan, penulis memilih 10 putusan untuk dianalisis secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup di Pengadilan Negeri Padang menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) dengan tingkat kompleksitas yang tinggi karena hakim dituntut memahami aspek teknis dan ilmiah objek perkara, sehingga keterangan ahli memegang peran sentral dalam menjelaskan unsur-unsur di luar pengetahuan umum hakim. Selanjutnya, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda meliputi pertimbangan yuridis dan *non-yuridis*, antara lain terpenuhinya unsur tindak pidana, tingkat kesalahan terdakwa, akibat yang ditimbulkan terhadap lingkungan, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta kemampuan ekonomi terdakwa. Penelitian ini juga menemukan bahwa pidana denda yang dijatuhkan umumnya masih berada jauh di bawah ancaman maksimum UUPPLH dan dalam beberapa perkara terdakwa lebih memilih menjalani pidana kurungan pengganti (*subsider*) daripada membayar denda.

Kata Kunci: Pidana Denda, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Sumatera Barat, Pengadilan Negeri Padang

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus 24 Agustus 2026.

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
		
Nama Terang	Riki Afrizal, S.H., M.H	Iwan Kurniawan, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Pidana: Riki Afrizal, S.H., M.H.


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

	Alumni University Number	Siti Istiazah	Alumni University Number
	a. Place/Date of Birth : Padang/ 27 th Maret 2004 b. Parents' Name : Iman Drajat, Rira Delvita, A.Md c. Faculty : Law d. Concentration : Criminal Law e. Student ID : 2210112092	f. Graduation Date : 26 th August 2026 g. Pass Predicate : Cumlaude h. Length of Study : 4 Years i. GPA : 3,73 j. Address : Jln. Murai, Air Tawar Barat, Kota Padang	

FINES IMPOSITION FOR ENVIRONMENTAL CRIMES IN WEST SUMATRA : A STUDY IN THE PADANG DISTRICT COURT

(Siti Istiazah, 2210112092, Faculty of Law, Andalas University, 133 Pages, 2026)

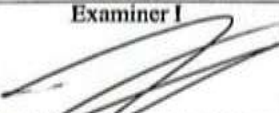
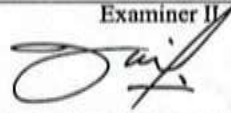
ABSTRACT

The environment is a constitutional right of every citizen that must be protected against pollution and destruction. Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH) stipulates various prohibitions and criminal sanctions, including substantial fines. However, in judicial practice, the fines imposed on perpetrators of environmental crimes are often disproportionate to the maximum penalties prescribed by the UUPPLH. This situation reveals a gap between normative provisions and their application in court rulings, warranting further study. The research addresses the following issues: (1) how evidence is established during the adjudication of environmental crimes at the Padang District Court; and (2) the grounds for judges' considerations when imposing fines for environmental crimes at the Padang District Court. This study employs an empirical-juridical method with a descriptive-analytical approach. Data were obtained through a documentary analysis of court rulings on environmental crimes at the Padang District Court from 2021 to 2025, as well as interviews with judges. Out of 28 identified cases, the author selected 10 rulings for in-depth analysis. The findings indicate that the evidentiary process for environmental crimes at the Padang District Court adheres to the negative statutory evidentiary system (*negatief wettelijk bewijstheorie*). This process is highly complex, as judges are required to comprehend the technical and scientific aspects of the case subject matter; consequently, expert testimony plays a pivotal role in elucidating elements that fall outside the scope of a judge's general knowledge. Furthermore, the judges' considerations for imposing fines encompass both juridical and non-juridical factors, including the fulfillment of the elements of the crime, the defendant's degree of culpability, the environmental impact caused, aggravating and mitigating circumstances, and the defendant's financial capacity. This study also found that the fines imposed generally remain far below the maximum penalties prescribed by the UUPPLH, and in some cases, defendants prefer serving a substitute term of imprisonment (subsidiary sentence) over paying the fine.

Keywords: Criminal Fines, Environmental Crimes, Evidence, Judge's Considerations, Padang District Court

This minor thesis has defended in front of the examiner team at August 24th, 2026.

Examiner,

Signature	Examiner I	Examiner II
		
Name	Riki Afrizal, S.H., M.H.	Iwan Kurniawan, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Department of State Criminal Law: Riki Afrizal, S.H., M.H.


Signature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty:	Name:	Signature:
No. Alumni University:	Name:	Signature: